

**FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDIT BADAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



**Nama : Mulyani Afri
Nim : 222022040**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2026**

**FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDIT BADAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Mulyani Afri
Nim : 222022040**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2026**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mulyani Afri
NIM : 222022040
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Pemeriksaan Akuntansi
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Badan Pemeriksaan Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini

Palembang, Mei 2026



Mulyani Afri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Badan
Pemeriksaan Keuangan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera
Selatan
Nama : Mulyani Afri
NIM : 222022040
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Pemeriksaan Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Audit Forensik Dan Audit Investigasi

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Mei 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Drs. Sunardi., S.E., M.Si., CGRM
NIDN/NBM : 020694630/784021



Lis Djuniar., S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0220067101/1115716

Mengetahui
Dekan
u.b Kena Program Studi Akuntansi



Aurianto, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0216087201/859190

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Walau jalanku tidak selalu cepat, aku yakin Allah sedang membimbingku.

Segala kesulitan yang kulalui adalah bagian dari rencana-Nya untuk menjadikanku pribadi yang lebih kuat, agar masa depanku hadir dengan kebaikan yang tak pernah kupikirkan sebelumnya”

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyarah: 5-6)

“Tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, selama kamu tidak berhenti”

“Confucius”

“Setiap tantangan bukan untuk menahan langkah, tetapi untuk menguatkan karakter dan membuka jalan menuju keberhasilan yang lebih besar”

“Mulyani”

(Mulyani Afri)

Dengan Rahmat dan Ridho
Allah SWT.

Kupersembahkan skripsi
yang Kubuat ini teruntuk :

1. Kedua Orang Tuaku
Tercinta
2. kakakku Tersayang
3. Teman dan sahabat kuliah
seperjuanganku
4. Diriku
5. Almamaterku

PRAKARTA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta‘ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.**” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Ucapan terimakasih penulis kepada Orang Tua tercinta Pertama-tama, terima kasih yang mendalam kepada almarhum Bapak Mulyono atas doa, bimbingan, dan pengorbanan tiada henti yang telah beliau berikan sepanjang hidupnya. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada ibu Hajaryati yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang, pengorbanan yang tiada henti dan doa senantiasa mendampingi selama hidup saya. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, skripsi ini saya persembahkan kepada mereka.

Ucapan terimakasih penulis juga menyampaikan kepada Bapak Dr. Drs. Sunardi, S.E., M.Si selaku pembimbing I dan Ibuk Lis Djuniar., S.E., M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena

itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Dr. Yudha Mahrom DS, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Aprianto S.E., M.Si dan Ibu Fenti Astriana S.E., M.Si selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. CTT selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan dari semester awal samapai sekarang.
5. Seluruh pimpinan, dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang atas bantuan dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Pemerintah Daerah yang telah menyediakan data penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar tanpa hambatan.
7. Kepada kakak tersayang saya cica susanty yang telah mendoakan dan menyemangati penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, semangat dan pengorbanan yang selalu diberikan dalam setiap proses yang saya lalui. Kehadiran kakak menjadi penguat di saat lelah, menjadi penyemangat di saat ragu, dan menjadi alasan untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini.

8. Kepada sahabat sekaligus keluarga selama masa kuliah dari semester awal hingga akhir. Fifi Nur Rahmawati, Rera Adistia dan Adinda Triwahyuni yang telah menemani dan menyemangati penulis selama diperkuliahan ini. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta dukungan yang telah diberikan sejak awal perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Setiap proses yang kita lalui bersama, baik dalam diskusi, tugas kelompok, berbagi informasi, maupun saling menyemangati di saat merasa lelah, menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.
9. Kepada rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2022 Program Studi Akuntansi, serta rekan-rekan satu pembimbing yang penulis kenal, penulis menyampaikan terima kasih atas motivasi dan kebersamaan yang telah terjalin. Semua pengalaman tersebut akan menjadi kenangan berharga yang akan senantiasa diingat hingga masa mendatang.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini usaha telah penulis lakukan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, Mei 2026

Penulis



Mulyani Afri

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
TANDA PENGESAHAN USULAN PENELITIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKARTA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	13
A. Kajian Pustaka	13
1. Landasan Teori	13
a. Teori Keagenan	13
2. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	15
a. Pengertian Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	15
b. Pengukuran Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	16
3. Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	16
a. Pengertian Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang Undangan	16
b. Pengukuran Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang Undangan	17
4. Hasil Opini Audit Tahun Sebelumnya.....	17

a. Pengertian Hasil Opini Audit Tahun Sebelumnya	17
b. Pengukuran Hasil Opini Audit Tahun Sebelumnya.....	18
5. Opini Audit BPK	18
a. Pengertian Opini Audit BPK.....	18
b. Pengukuran Opini Audit BPK	19
B. Penelitian Sebelumnya.....	28
C. Kerangka Pemikiran	24
D. Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Operasional Variabel	29
D. Populasi Dan Sampel.....	30
E. Data yang diperlukan	32
F. Metode Pengumpulan Data	33
G. Analisis Data dan Teknik Analisis Data.....	34
1. Analisis Data.....	34
2. Teknik Analisi	35
a. Analisis Statistik Deskriptif	35
b. Analisis Regresi Logistik.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
2. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten/Kota yang Dijadikan Sampel Penelitian	44
3. Hasil Pengolahan Data.....	48
4. Teknik Analisis.....	53
5. Pengujian Hipotesis	60
B. Pembahasan Hasil Penelitian	67
1. Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Opini Audit BPK	67
2. Pengaruh Ketidapatuhan Terhadap Peraturan PerundangUndangan Terhadap Opini Audit BPK.....	68

3. Pengaruh Hasil Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Opini Audit BPK	69
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2022	7
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	20
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	30
Tabel III.2 Sampel Penelitian.....	32
Tabel IV.1 Deskripsi Data Pemerintah Daerah Yang Menjadi Sampel Tahun 2020-2024.....	49
Tabel IV.2 Hasil Analisis Data Statistik Deskriptif.....	53
Tabel IV.3 Nilai -2 Log Likelihood (-2LL Awal)	56
Tabel IV.4 Nilai -2 Log Likelihood (-2LL Akhir)	56
Tabel IV.5 Hosmer and Lemeshow Test.....	58
Tabel IV.6 Model Summary	58
Tabel IV.7 Matrik Klasifikasi.....	59
Tabel IV.8 Hasil Uji Model Regresi Logistik	61
Tabel IV.9 Hasil Uji Secara Parsial (Uji Wald)	64
Tabel IV.10 Omnibus Test Of Model Coefficient	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Model Kerangka Pemikiran	27
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 Data Populasi
- Lampiran 3 Tabulasi Data Laporan Keuangan Pemeriksaan BPK
- Lampiran 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif
- Lampiran 5 Pengujian Hipotesis
- Lampiran 6 Tabel Nilai Distribusi Chi Square
- Lampiran 7 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 Surat Keterangan Riset Tempat Penelitian
- Lampiran 9 Sertifikat Membaca Dan Menghafal Al-Quran
- Lampiran 10 Sertifikat SPSS
- Lampiran 11 Sertifikat Pengantar Aplikasi Komputer
- Lampiran 12 Sertifikat Komputer Akuntansi
- Lampiran 13 Sertifikat SKPI
- Lampiran 14 Plagiarisme
- Lampiran 15 Biodata Penulis

ABSTRAK

Mulyani Afri / 222022040 / Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Hasil opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2024. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis regresi logistik dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan hasil opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap opini audit BPK. Secara parsial, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan dengan arah negatif, dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap opini audit BPK. Namun, kelemahan SPI ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit BPK pada LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Opini Audit BPK, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Hasil Opini Audit Tahun Sebelumnya.

ABSTRACT

Mulyani Afri / 222022040 / Factors Influencing the Audit Opinion of the Supreme Audit Agency (BPK) on Financial Statements (Empirical Study of Regency/Municipal Local Governments in South Sumatra Province, 2020–2024)

This study aims to analyze the influence of Internal Control System (ICS) weaknesses, non-compliance with statutory provisions, and previous year's audit opinion on the BPK audit opinion of Local Government Financial Reports (LKPD) in Regencies/Cities of South Sumatra Province for the 2020-2024 period. The population in this study includes all regency and city local governments in South Sumatra Province. The data used is secondary data obtained through the documentation method from the Audit Result Reports (LHP) of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The data analysis technique applied is logistic regression analysis using the SPSS program. The results of the study indicate that simultaneously, ICS weaknesses, non-compliance with laws and regulations, and previous year's audit opinion have a significant effect on the BPK audit opinion. Partially, non-compliance with laws and regulations has a significant negative effect, and the previous year's audit opinion has a significant positive effect on the BPK audit opinion. However, ICS weakness was found to have no significant effect on the BPK audit opinion of Regency/City LKPD in South Sumatra Province.

Keywords: BPK Audit Opinion, Internal Control System, Non-Compliance with Regulations, Previous Year's Opinion.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Dengan laporan ini, diharapkan pemerintah daerah bisa mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran public. Untuk mencapai hal tersebut, laporan keuangan pemerintah harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang bertujuan untuk menjamin bahwa keuangan negara dikelola secara sistematis, sesuai dengan peraturan, dan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel. Hasil audit akan disampaikan melalui opini audit yang menunjukkan tingkat keakuratan penyajian laporan keuangan.

BPK memberikan empat katagori opini audit yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan pendapat (TMP). Opini WTP merupakan target yang diinginkan oleh pemerintah daerah, karna opini ini menandakan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Namun, kenyataan tidak semua pemerintah daerah berhasil mendapatkan opini WTP. Perbedaan opini yang muncul diantara daerah menunjukkan bahwa ada

banyak faktor yang memengaruhi kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan.

Opini audit BPK merupakan komponen fundamental dari laporan audit. Laporan audit merupakan bagian penutup dari prosedur audit yang komprehensif. Auditor mengeluarkan opini audit setelah melalui beberapa tahapan proses audit, yang memungkinkan auditor untuk merumuskan pertimbangan mengenai laporan keuangan auditee. Opini audit mewakili kesimpulan auditor yang diperoleh dari serangkaian prosedur audit, yang menekankan kepatuhan laporan keuangan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Irman & Suryati, 2017).

BPK sebagaimana dirinci dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2020, mengidentifikasi bahwa kekurangan dalam sistem pengendalian internal umumnya disebabkan oleh kelalaian pejabat atau pelaksana yang bertugas menyiapkan laporan keuangan, pelaksanaan tanggung jawab yang suboptimal, kurangnya pemahaman tentang ketentuan hukum, koordinasi yang tidak memadai dengan pihak-pihak terkait, langkah-langkah pengawasan dan pengendalian yang lemah, prosedur persediaan yang kurang memadai, dan sistem aplikasi yang tidak efektif, serta entri yang tidak lengkap atau salah. Sebagai contoh, peralatan yang tidak tercantum dalam neraca atau nilai aset dalam neraca mungkin berbeda dari dokumen pendukung (Tyaswarman, 2022).

Ketidapatuhan terhadap peraturan dan ketentuan sangat memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan dan ketentuan mencakup aktivitas ilegal, penipuan, dan pelanggaran yang secara signifikan memengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan (BPK RI IHPS, 2021).

Opini audit tahun sebelumnya sesuai dengan Standar Audit Negara menunjukkan bahwa auditor mempertimbangkan temuan audit sebelumnya selama proses audit saat ini. Instruksi Teknis (juknis) BPK, yang merupakan bagian integral dari SPKN, menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya merupakan faktor dalam menetapkan tingkat materialitas awal, yang membantu dalam merumuskan opini audit selanjutnya. Opini yang lebih baik dari tahun sebelumnya berkorelasi dengan tingkat materialitas yang lebih tinggi yang ditetapkan, sehingga memengaruhi signifikansi temuan audit dan opini audit selanjutnya (Zifi & Ali, 2019).

Penelitian tentang kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) yang dilakukan (Widodo & Sudarno, 2017), (Nasution *et al.*, 2023) mengatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh Negatif terhadap opini audit. Berbeda pendapat dengan yang dilakukan oleh (Fitria *et al.*, 2024), (Mutiarra *et al.*, 2022) Menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit.

Penelitian tentang ketidakpatuhan terhadap aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh (Putri & Simanjuntak, 2023), (Widodo & Sudarno, 2017) mengatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap aturan

perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Berbeda pendapat dengan yang dilakukan oleh (Nasution *et al.*, 2023), (Aen Fariah, 2020) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap aturan perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit.

Penelitian tentang hasil opini audit tahun sebelumnya yang dilakukan (Mainingrum *et al.*, 2023), (Zifi & Ali, 2019) Mengatakan bahwa hasil opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap opini audit BPK. Berbeda pendapat dengan yang dilakukan oleh (Irman & Suryati, 2017) menunjukkan bahwa hasil audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap opini audit BPK.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Ihtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Hasil penilaian menunjukkan bahwa 14 pemerintah daerah memperoleh Opini (WTP), sedangkan empat pemerintah daerah memperoleh Opini (WDP). Di antara keempatnya, 14 pemerintah daerah berhasil mempertahankan status WTP, namun tiga pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, dan Kota Pagaralam mengalami penurunan dari WTP menjadi WDP. Lebih jauh lagi, BPK mendeteksi adanya penyimpangan lain terkait aset, pendapatan, pengeluaran, dan transfer, termasuk pendaftaran aset yang tidak memadai, manajemen

pendapatan yang kurang, dan pengeluaran yang melanggar hukum, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran. BPK mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan operasional berdasarkan hasil tersebut dengan menerapkan manajemen aset dan inventaris yang komprehensif, meningkatkan pengendalian pendapatan, dan memulihkan kerugian daerah atau kelebihan pembayaran ke kas daerah (BPR RI IHPD, 2023).

Fenomena kelemahan sistem pengendalian intern di pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal (SPI) masih kurang optimal. Ringkasan Hasil Audit Daerah (IHPD) 2022 untuk Provinsi Sumatera Selatan, yang dirilis oleh Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPK) Provinsi Sumatera Selatan, mengungkapkan bahwa audit terhadap 18 Laporan Keuangan Daerah (IKPD) tahun 2021 menemukan 47 masalah terkait kekurangan dalam sistem pengendalian intern. Meskipun sebagian besar pemerintah daerah memperoleh opini (WTP), adanya kekurangan dalam sistem pengendalian menunjukkan bahwa prosedur pengawasan dan pengelolaan keuangan belum sepenuhnya terlaksana. Keadaan ini dapat mengakibatkan kemungkinan ketidakakuratan dalam penyusunan laporan keuangan dan dapat memengaruhi kualitas opini audit yang diberikan oleh BPK. Oleh karena itu, kekurangan dalam sistem pengendalian intern merupakan masalah signifikan yang memerlukan investigasi tambahan mengenai opini audit dari BPK (BPK RI IHPD, 2022).

ketidakpatuhan terhadap peraturan dan ketentuan masih menjadi tantangan signifikan dalam administrasi keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Laporan Keuangan Daerah (IHPD) tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifikasi 441 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan dan ketentuan dari 233 audit yang dilakukan. Kasus-kasus ini meliputi berbagai jenis pelanggaran, seperti anomali administrasi, kekurangan dalam pelaksanaan pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan manajemen keuangan. Lebih jauh lagi, di antara kasus-kasus tersebut, 225 kasus ketidakpatuhan mengakibatkan dampak finansial, termasuk kerugian daerah, potensi kerugian, dan defisit pendapatan sebesar Rp218.561,86 juta. Selain itu, ditemukan 66 kasus penyimpangan administrasi dan 150 kekurangan dalam pengendalian internal (SPI). Kuantitas dan signifikansi temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pemerintah daerah terhadap hukum dan peraturan dalam administrasi keuangan masih kurang memadai (IHPD BPK RI, 2021).

Penelitian pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2024. Adapun data pemerintahan dijadikan sampel selama periode penelitian sebagai berikut.

Tabel I.I
Data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

No	KABUPATEN/KOTA	Tahun	K SPI (X1)	K P (X2)	H A T S (X3)	O A BPK (Y)
1	Kota Palembang	2020	15	13	1	1
		2021	6	14	1	1
		2022	12	19	1	0
		2023	8	14	0	1
		2024	11	12	1	1
2	Kota Pagar Alam	2020	4	11	1	1
		2021	5	8	1	1
		2022	6	18	1	0
		2023	7	13	0	1
		2024	5	16	1	1
3	Kota Lubuk Linggau	2020	4	9	1	1
		2021	5	8	1	1
		2022	11	9	1	1
		2023	12	12	1	1
		2024	10	11	1	1
4	Kota Prabumulih	2020	9	10	1	1
		2021	9	10	1	1
		2022	17	22	1	1
		2023	12	18	1	1
		2024	13	13	1	1
5	Kabupaten Banyuasin	2020	4	17	1	1
		2021	0	11	1	1
		2022	14	23	1	1
		2023	8	21	1	1
		2024	6	20	1	1
6	Kabupaten Muba	2020	11	7	1	1
		2021	6	15	0	0
		2022	6	29	1	0
		2023	7	21	0	0
		2024	8	17	0	0
7	Kabupaten Ogan Ilir	2020	16	18	1	1
		2021	11	10	1	1
		2022	14	26	1	0
		2023	12	19	0	1
		2024	13	22	1	1
8	Kabupaten OKI	2020	12	8	1	1
		2021	16	16	1	1

		2022	7	20	1	1
		2023	8	21	1	1
		2024	9	18	1	1
9	Kabupaten OKU	2020	11	9	1	1
		2021	8	11	1	1
		2022	14	17	1	1
		2023	13	19	1	1
		2024	12	18	1	1
10	Kabupaten OKUS	2020	3	13	1	1
		2021	5	16	1	1
		2022	13	18	1	1
		2023	12	20	1	1
		2024	8	21	1	1
11	Kabupaten OKUT	2020	4	15	1	1
		2021	6	8	1	1
		2022	9	20	1	1
		2023	7	23	1	1
		2024	5	17	1	1
12	Kabupaten Muratara	2020	2	15	1	1
		2021	9	11	1	1
		2022	6	13	1	1
		2023	5	17	1	1
		2024	4	18	1	1
13	Kabupaten Lahat	2020	10	9	1	1
		2021	9	19	1	1
		2022	7	15	1	1
		2023	7	20	1	1
		2024	4	19	1	1
14	Kabupaten Muara Enim	2020	11	13	1	1
		2021	7	15	1	1
		2022	2	15	1	1
		2023	5	17	1	1
		2024	3	14	1	1
15	Kabupaten Empat Lawang	2020	10	18	1	1
		2021	11	11	1	1
		2022	14	25	1	1
		2023	12	23	1	1
		2024	12	21	1	1
16	Kabupaten Musirawas	2020	6	10	1	1
		2021	9	12	1	1
		2022	25	22	1	1
		2023	17	23	1	1

17	Kabupaten PALI	2024	14	18	1	1
		2020	8	12	1	0
		2021	10	12	0	1
		2022	5	14	1	1
		2023	8	16	1	0
		2024	11	15	0	0

Sumber : (data yang diolah 2026)

Menurut data audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2024, diamati bahwa kualitas opini audit BPK yang diterima oleh pemerintah daerah tidak konsisten dengan kondisi sistem pengendalian intern (SPI), tingkat ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan, atau hasil audit tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022, Kabupaten Musi Rawas melaporkan skor kekurangan SPI sebesar 25, yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal masih kurang memadai dan pengawasan tidak efektif. Kelemahan SPI yang lebih signifikan berkorelasi dengan peningkatan kemungkinan pemalsuan dalam laporan keuangan, sehingga berpotensi mengurangi opini audit. Meskipun demikian, daerah tersebut memperoleh opini tanpa kualifikasi, yang menunjukkan bahwa kekurangan yang diidentifikasi oleh BPK dianggap tidak berdampak pada keandalan laporan keuangan.

Sebaliknya, Kabupaten Banyuasin pada tahun 2021 mencatat nilai kelemahan SPI sebesar 0, yang menandakan tidak adanya temuan kelemahan dalam pengendalian internal. Nilai SPI yang sangat rendah menunjukkan bahwa manajemen dan prosedur pengendalian internal

berfungsi dengan baik. Dalam situasi seperti ini, kesempatan untuk mendapatkan opini WTP meningkat karena laporan keuangan dianggap dapat dipercaya dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Dari segi ketidakpatuhan, wilayah Kabupaten Empat Lawang dengan nilai ketidakpatuhan yaitu 25, yang mencerminkan angka pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Secara logis, semakin tinggi tingkat ketidakpatuhan, semakin besar kemungkinan penurunan opini audit karena risiko kesalahan dan penyimpangan anggaran meningkat. Namun di wilayah tersebut BPK tetap memberikan opini WTP, berarti ketidakpatuhan itu tidak berpengaruh material terhadap penyajian laporan keuangan. Sementara itu, kawasan dengan nilai ketidakpatuhan 7 menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih rendah dan risiko penyimpangan yang rendah, sehingga secara logis lebih mungkin mendapatkan opini WTP.

Selanjutnya, keterkaitan antara hasil opini audit pada tahun sebelumnya dan opini di tahun ini menunjukkan pola yang serupa. Jika hasil opini audit tahun sebelumnya 0 dan penilaian tahun ini juga 0, berarti pemerintah daerah belum menangani permasalahan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pendapat yang tetap 0 adalah hal yang wajar. Jika hasil opini audit tahun sebelumnya 1 tetapi penilaian tahun ini menurun menjadi 0, maka pada tahun ini ada temuan baru atau masalah yang semakin buruk, seperti kelemahan SPI atau ketidakpatuhan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2024 menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sistem pengendalian intern, tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan hasil opini audit tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2024.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern terhadap Opini Audit BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bagaimana pengaruh Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan terhadap Opini Audit BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatra Selatan.
3. Bagaimana pengaruh Hasil Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Opini audit BPK pada laporan keungan pemerintah daerah di Provinsi Sumatra Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern terhadap Opini Audit BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan terhadap Opini Audit BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan
3. Untuk mengetahui pengaruh Hasil Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Opini Audit BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang hubungan antara pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Hasil Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Opini Audit Bpk.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintahan khususnya mengenai Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Hasil Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Opini Audit BPK

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian penulisan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aen Fariah, I. N. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kota Cirebon Jawa Barat. *Jurnal Sosial Teknik*, 2(2).
- Amalia, F. R., & Purwanto, A. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompleksitas Pemerintah Daerah dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Temuan Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa T. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(1), 2337–3806.
- Amyulianthy, R., Anto, A. S. U., & Budi, S. (2020). Temuan dan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 1(1).
- Bangsawan, A. A., & Abbas, A. (2021). Efek Pelanggaran Standar Akuntansi Pemerintahan dan Ketidakpatuhan Peraturan terhadap Opini Audit Laporan Keuangan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2).
- BPK RI IHPD. (2022). *Iktisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sumatera Selatan*.
- BPK RI IHPS. (2021). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020*.
- BPR RI IHPD. (2023). *Iktisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun*.
- Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi*, 4(1).
- Fitria, N. K., Zakaria, A., & Sari, I. M. (2024). Pengaruh SPI, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Opini Audit BPK. *VISA: Jurnal of Vision And Ideas*, 4(1), 2809–2643.
- Hasnowo, J., & Haryanto. (2016). Pengaruh Klasifikasi Temuan Pemeriksaan dan Opini Tahun Sebelumnya terhadap Penentuan Opini Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 5(4).
- IHPD BPK RI. (2021). *Iktisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sumatera Selatan*.

- Irman, M., & Suryati. (2017a). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan, Opini Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2014. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 2(2), 197–209.
- Irman, M., & Suryati. (2017b). The Influence of Internal Control System Weaknesses, Incompliance towards Laws and Regulations, the Previous Year's Audit Opinion and the Age of the Local Government against Acceptance of an Audit Opinion in the Local Government/Riau Province in 2011–2014. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia*, 2(2), 2527–8215.
- Islami, N. P., Sandrayati, S., & Indriasari, D. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pada Pemerintah Provinsi di Sumatera Tahun 2018-2022. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 21(23), 1693–4091. <https://doi.org/https://doi.org/10.31851/jmwe.v21i3.16598>
- Kamilah, N. F., Zakaria, A., & Mulyahsari, I. (2024). Pengaruh SPI, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit BPK. *Jurnal of Visions and Ideas*, 4(1).
- Kaomaneng, I. S., Morasa, J., Gamaliel, H., & Lambey, R. (2023). *Good Corporate Governance dalam Sektor Publik*. CV. Mega Press Nusantara.
- Ladewi, Y., & Welly. (2024). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. NoerFikri.
- Mainingrum, R., Sjarlis, S., Oktaviani, A. R., & Meuthia, R. F. (2023). The Effect of Audit Findings, Follow-Up Audit Recommendations, And BPK Opinions from The Previous Year on The Determination of Opinions in Local Government Financial Statements. *Economics, Business, Accounting & Society Review*, 2(1), 2810–0115. <https://doi.org/https://doi.org/10.55980/ebasr.v2i1.56>
- Mutiara, R., Masnila, N., & Nurhasanah, N. (2022). *Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan pada Perundang-Undangan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah*. 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.59261/jequi.v4i2.99>
- Nasution, N. I., Rokan, M. K., & Lubis, A. W. (2023). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Opini Audit Bpk atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2019-2021. *Jurnal Pendidikan Tembusai*, 7(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.12076>

- Putri, A. A. A. M., & Simanjuntak, H. Y. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Ketidapatuhan pada Peraturan Perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Opini Audit. *Accounting and Management Journal*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33086/amj.v7i1>
- Sasmita, R. P. H. (2021). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit BPK terhadap Understandability dalam Kualitas Laporan Keuangan. *Modus*, 33(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/modus.v33i1.4171>
- Simanjuntak, H. Y., Agustiawan, & Putri, A. M. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Ketidak Patuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pada BPK Perwakilan Provinsi Riau). *Accounting and Management Journal*, 7(1), 95–107.
- Tyaswarman, R. B. (2022). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2020)*. Universitas Islam Indonesia.
- Widodo, O. P., & Sudarno. (2017a). Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap Opini Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–9.
- Widodo, O. P., & Sudarno. (2017b). Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Ofaccounting*, 6(1), 233-.
- Zifi, M. P., & Ali, F. (2019). Pengaruh Opini Audit Sebelumnya Terhadap Opini BPK Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 12(2), 39–42.